

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kepercayaan Publik pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang

Khoirul Fuad¹
Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, Indonesia

Rizka Yulia Baharani²
Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, Indonesia

Surel : khoirulfuad@unissula.ac.id

ABSTRAK

Isu strategis terkait otonomi daerah masih sangat penting untuk dikaji mendalam, adanya dana yang bergulir dari pemerintah pusat ke daerah yang semakin besar menuntut pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel baik kepada pemerintah pusat maupun *stakeholder*, sehingga tingkat kepercayaan yang timbul semakin baik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Semarang dengan teknik pengambilan sampel *accidental sampling* kepada pihak yang memenuhi kriteria yaitu yang secara langsung berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memberikan efek positif dan signifikan terhadap kepercayaan *public stakeholder* hal ini berarti bahwa keterbukaan informasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan dari pemerintah daerah akan memberikan dampak yang baik kedepannya sehingga perilaku *stakeholder* juga akan semakin baik ke pemerintah daerah.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Kepercayaan Publik; Pemerintah Daerah.

Accountability of Regional Financial Management and Level of Public Trust in Regional Apparatus Organizations in the City of Semarang

ABSTRACT

Strategic issues related to regional autonomy are still very important to be studied in depth. The existence of funds that revolve from the central government to the greater area demands transparent accountability both to the central government and stakeholders so that the level of trust that arises is getting better. This study used a quantitative method by distributing questionnaires to the Regional Organization (OPD) in Semarang, Indonesia with an accidental sampling technique to those who are directly related to regional financial management. The results of this study indicate that regional financial management accountability has a positive and significant effect on public stakeholder trust. Therefore, disclosure of financial information and financial accountability from local governments will have a good impact in the future and the behavior of stake holders on local governments will also be better.

Keywords: *Accountability; Public Trust; Local Government.*

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 31 No. 4
Denpasar, April 2021
Hal. 985-995

DOI:
10.24843/EJA.2021.v31.i04.p15

PENGUTIPAN:

Fuad, K., & Baharani, R.Y.
(2021). Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Tingkat
Kepercayaan Publik pada
Organisasi Perangkat Daerah
di Kota Semarang. *E-Jurnal
Akuntansi*, 31(4), 985-995

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
2 Juni 2020
Artikel Diterima:
24 April 2021

PENDAHULUAN

Di Indonesia dasar utama yang digunakan dalam Pengelolaan keuangan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.13 Tahun 2006 yang diperbaharui menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan diperbaharui menjadi Permendagri No. 32 Tahun 2011 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 adalah perubahan kedua Permendagri No. 13 tahun 2006 mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai pertanggungjawaban dan pengawasan penggunaan anggaran daerah. Pengelolaan keuangan daerah terdiri dari aktivitas pelaksanaan, pengawasan, perencanaan, pengendalian pelaporan serta evaluasi (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2005*).

Fenomena yang terjadi perihal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu adanya ketidakpatuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan yang menjadikan kualitas laporan keuangan pemerintah menurun, sehingga mendapatkan opini WDP berdasarkan hasil audit BPK. Berdasarkan data berupa informasi dari pihak badan pemeriksa keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 terdapat beberapa pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian, data tersebut disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Pemerintah Daerah di Jawa Tengah dengan Opini WDP

Pemerintah Daerah	Jenis Opini
Kota Salatiga	WDP
Kab. Demak	WDP
Kab. Rembang	WDP
Kota Magelang	WDP
Kab. Cilacap	WDP
Kab. Purbalingga	WDP
Kab. Batang	WDP
Kab. Pemasang	WDP

Sumber: Data Penelitian, 2020

Perlu diketahui beberapa pemerintah daerah di Jawa Tengah masih meraih opini WDP yang diberikan dari pihak BPK. Peraihan opini tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal yaitu terdapat piutang macet dari BUMD yang belum jelas jumlah yang terealisasi karena statusnya masih dalam proses penegakan hukum, adanya kekurangan kas yang belum ditetapkan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. Selain dua hal tersebut, terdapat aset tetap tanah yang belum dapat dipastikan kewajarannya, tidak diketahui keberadaannya, bersertifikat ganda. Selanjutnya, aset tetap (peralatan dan mesin) yang tidak dijelaskan unit, jenis, jumlah dan keberadaannya. Masih kurangnya pengendalian intern seperti kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan aset tetap tanah dan pengelolaan dana, Selain itu, berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan (SHP) mengenai Laporan Keuangan Pemkab Wonogiri 2016 tertanggal 29 Mei 2017, BPK menemukan beberapa catatan atas sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan kepada ketentuan perundang-

undangan. Pada sistem pengendalian intern, ditemukan adanya kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan seperti ihwal piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang belum diverifikasi (Solopos, 2017).

Beberapa hasil penelitian sebelumnya memunculkan hasil yang belum konsisten misalnya penelitian dari Yolanda (2018) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan dan hasil tersebut berlawanan dengan penelitian Mulyani (2018), begitu juga dengan aksesibilitas laporan keuangan yang ditemukan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Yolanda, 2018), akan tetapi hasil penelitian dari Putri (2018) tidak menemukan hasil yang sama. Ketidakkonsistenan hasil penelitian juga ditemukan dari variabel sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dimana Mulyani (2018) menemukan hasil positif signifikan sedangkan Putri (2018) menemukan hasil yang sebaliknya. Ketidakkonsistenan hasil penelitian dari variabel selanjutnya adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kepercayaan *public stakeholder* yaitu hasil penelitian Nurrizkiana *et al.* (2017) menemukan hasil positif signifikan sedangkan Rahmawati (2013) menemukan hasil yang berlawanan.

Pada penelitian ini *Agency teory* digunakan sebagai dasar teorinya dimana pada pemerintah daerah dinyatakan bahwa adanya hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah. Dimana dalam hal ini masyarakat bertindak *sebagai principal* dan pemerintah bertindak *sebagai agent*. Seperti halnya, akuntabilitas yang merupakan wujud dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat yang wajib menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan semua aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada *principal* yang dimana memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sistem akuntansi pemerintah yang menjelaskan perubahan sistem akuntansi yang berbasis akrual memiliki serangkaian prosedur yang dimulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan keuangan dengan tujuan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara komputerisasi maupun manual. Hasil penelitian Putri (2018) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Yolanda (2018) dan Surjono & Firdaus (2017) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah ini memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H₁ : Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyajian laporan keuangan akan meningkatkan akuntabilitas, hal ini terjadi dikarenakan pertanggungjawaban mengenai laporan keuangan oleh pemerintah daerah kepada publik yang transparan akan meminimalisir tindak kecurangan yang akan terjadi. Hasil penelitian dari Fauzani *et al.* (2018) penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Mulyani (2018) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H₂ : Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan, dimana laporan keuangan yang disajikan harus mudah dan dapat dimengerti bagi pihak-pihak yang ingin mengetahuinya. Hasil penelitian Fauzani *et al.* (2018) menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu ada juga penelitian Hehanussa (2015) memperkuat bahwa aksesibilitas memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H₃ : Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

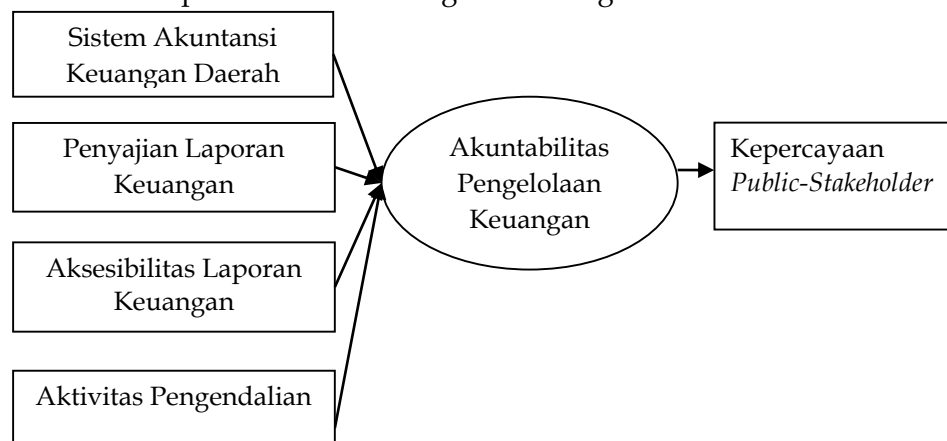
Sistem pengendalian intern pemerintah mampu untuk menjalankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif seperti pemeriksaan barang, fisik kas dan catatan akuntansi dan dapat untuk menindaklanjuti hasil atau interview yang diberikan pihak pemeriksa laporan keuangan. Hasil penelitian Mulyani (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H₄ : Aktivitas pengendalian berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas dalam bentuk publik merupakan sarana dalam pemberian informasi atas segala aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan laporan tersebut. Hasil penelitian Nurrizkiana *et al.* (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan *public-stakeholder*.

H₅ : Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kepercayaan *public-stakeholder*.

Berdasarkan latar belakang, telaah teori dan pengembangan hipotesis tersebut maka model penelitian bisa diringkas dalam gambar berikut ini.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2020

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah pegawai organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Semarang pada bagian keuangan. Metode pengambilan sampel penelitian menggunakan *accidental sampling*, metode ini pilih karena untuk memudahkan peneliti dalam pengambilan sampel. Sampel penelitian adalah pegawai OPD bagian keuangan yang menduduki jabatan sebagai kepala dinas, kasubag keuangan, bendahara, verifikator laporan keuangan, dan penata laporan keuangan. Pengukuran variabel dan indikator masing - masing variabel dapat dilihat pada Tabel 2, berikut ini.

Tabel 2. Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Pengukuran
SAKD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Basis akuntansi 2. Unsur-unsur laporan realisasi anggaran 3. Penyusunan APBD 4. Penyusunan laporan keuangan menurut PP No.71 tahun 2010 <p>Sumber: Superdi (2017)</p>	Skala Likert
Penyajian laporan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andal 2. Relevan 3. Dapat diabndingkan 4. Dapat dipahami <p>Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010)</p>	Skala Likert
Aksesibilitas laporan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbuka dimedia massa 2. Mudah diakses 3. Ketersediaan informasi <p>Sumber: Superdi (2017)</p>	Skala Likert
Aktivitas pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan <p>Sumber: Krismiaji (2015)</p>	Skala Likert
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku 2. Pertanggungjawaban kepada publik 3. Terbuka, cepat dan tepat 4. Penyusunan APBD 5. Memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen <p>Sumber: Superdi (2017)</p>	Skala Likert
Kepercayaan <i>public-stakeholder</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keyakinan dan kepercayaan publik 2. Partisipasi publik 3. Wawasan dan pengetahuan <i>public-stakeholder</i> 4. Ketaatan terhadap peraturan <p>Sumber: Nurritziana <i>et al.</i> (2017)</p>	Skala Likert

Sumber: Data Penelitian, 2020

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner. Kuesioner disebarakan secara langsung kepada responden dengan mendatangi setiap kantor OPD. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan SPSS versi 25 dengan menggunakan beberapa analisis yaitu analisis statistic deskriptif, uji kualitas data berupa validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan sederhana, uji statistic t, dan uji kebaikan model yang berupa uji simultan dan koefisien determinasi. Rumus yang digunakan untuk analisis regresi dalam penelitian ini ada dua yaitu.

$$Y_1 = a+b_1X_1+b_2X_2+b_3X_3+b_4X_4+ \varepsilon_1 \dots\dots\dots(1)$$

$$Y_2 = a+b_1X_{ia}+ \varepsilon \dots\dots\dots(2)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan pengolahan data dengan alat statistic SPSS 25 bisa dijelaskan bahwa hasil penelitian ini mampu mendapatkan responden dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang sebanyak 89 kuesioner yang memenuhi kriteria dan diolah dengan ringkasan penyebaran kuesionernya dijabarkan dalam bentuk Tabel 3, berikut ini.

Tabel 3. Ringkasan Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persen
Kuesioner yang disebarakan	107	100
Kuesioner yang tidak kembali	9	8,41
Kuesioner yang kembali	91	85,05
Kuesioner yang memenuhi kriteria	89	83,18
Kuesioner yang tidak memenuhi kriteria	2	1,87

Sumber: Data Penelitian, 2020

Pada Tabel 3, yang sudah disajikan tersebut bisa disimpulkan bahwa kuesioner yang bisa digunakan untuk alat olah selanjutnya berjumlah 89 dengan prosentase sebesar 83,18%.

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa keseluruhan item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini dikatakan valid, hal ini dikarenakan nilai r hitung dari keseluruhan item pertanyaan memiliki nilai lebih besar dari r tabel, sehingga semua item pertanyaan bisa digunakan dalam penelitian ini.

Sedangkan untuk hasil uji reliabilitas bisa dilihat pada Tabel 5, hasil uji reliabilitas sendiri berfungsi untuk melihat keandalan dan konsistennya data sebagai alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini, dari hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini ditemukan semua variabel memenuhi kategori reliabel.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Sistem akuntansi keuangan daerah	0,902	Reliabel
Penyajian laporan keuangan	0,897	Reliabel
Aksesibilitas laporan keuangan	0,758	Reliabel
Aktivitas pengendalian	0,917	Reliabel
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	0,927	Reliabel
Kepercayaan <i>public-stakeholder</i>	0,817	Reliabel

Sumber: Data Penelitian, 2020

Uji normalitas dalam penelitian dapat dilihat menggunakan normal *p-plot* dimana apabila data menyebar disekitar garis diagonal serta mengikuti arah

garis diagonal maka model regresi terdistribusi normal, serta menggunakan uji kolmogrov-smirnov dengan hasil berikut ini;

Hasil uji normalitas dijadikan dasar untuk menunjukkan kategori data dilihat dari nilai signifikansi yang harus diatas 0,05 untuk memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Uji Kolmogrov-Smirnov Test	
	Test Statistic	Asymp.Sig. (2-tailed)
Model Regresi 1		
Sistem akuntansi keuangan daerah		
Penyajian laporan keuangan	0,056	0,200
Aksesibilitas laporan keuangan		
Aktivitas pengendalian		
Model Regresi 2		
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0,061	0,200

Sumber: Data Penelitian, 2020

Pada Tabel 5, mengenai hasil uji normalitas dengan uji *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan bahwa hasil nilai dari *Asymp.Sig (2-tailed)* dari setiap variabel bernilai $0,200 > 0,05$ hal ini berarti bahwa data residual yang ada dalam penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal dan bebas dari asumsi klasik.

Tabel 6. Hasil Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Sistem akuntansi keuangan daerah	0,539	1,854
Penyajian laporan keuangan	0,379	2,641
Aksesibilitas laporan keuangan	0,450	2,224
Aktivitas pengendalian	0,549	1,823

Sumber: Data Penelitian, 2020

Dalam Tabel 6, menunjukkan bahwa nilai *tolerance* yang dihasilkan lebih besar dari 0.1 dan nilai VIF lebih besar dari 10 artinya data yang digunakan dalam penelitian tidak terjadi masalah korelasi antara variabel independen.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi Regresi

Koefisien Determinasi Regresi 1	
<i>R Square</i>	0,657
<i>Adjusted R Square</i>	0,641
Koefisien Determinasi Regresi 2	
<i>R Square</i>	0,638
<i>Adjusted R Square</i>	0,633

Sumber: Data Penelitian, 2020

Berdasarkan Tabel 7, dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* untuk variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu 0,641 yang dapat dikatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan daerah, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan aktivitas pengendalian sebesar 64,1%, sedangkan 35,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Selain itu dari Tabel 7, dapat diketahui pula bahwa nilai *Adjusted R Square* untuk variabel kepercayaan *public-stakeholder* yaitu 0,633 yang dapat dikatakan bahwa kepercayaan *public-stakeholder* dipengaruhi oleh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 63,3%, sedangkan 36,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

Tabel 8. Uji F

ANOVA	F	Sig.
Regresi 1	40,242	0,000
Regresi 2	153,057	0,000

Sumber: Data Penelitian, 2020

Berdasarkan Tabel 8, dalam pengujian F menunjukkan bahwa hasil dari model regresi 1 dan model regresi 2 memperoleh nilai signifikan masing-masing 0,000 artinya nilai signifikan yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05. Maka masing-masing model regresi tersebut berpengaruh secara simultan.

Tabel 9. Uji Statistik t

Hipotesis	Regresi	B	Sig.	Keterangan
H ₁	SAKD □ APKD	0,569	0,001	Diterima
H ₂	PLK □ APKD	0,511	0,001	Diterima
H ₃	ALK □ APKD	0,217	0,213	Ditolak
H ₄	AP □ APKD	0,185	0,071	Ditolak
H ₅	APKD □ KPS	0,584	0,000	Diterima

Sumber: Data Penelitian, 2020

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis pertama diperoleh bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dilihat dari nilai B dengan arah positif dan signifikan dilihat dari nilai signifikansi dibawah 0,05 terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Adanya hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018), Yolanda (2018), dan Surjono & Firdaus (2017) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang selalu diperhatikan mampu menciptakan suatu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis kedua diperoleh bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dilihat dari nilai B dengan arah positif dan signifikan dilihat dari nilai signifikansi dibawah 0,05 signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Adanya hubungan antara penyajian laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah selaras dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Fauzani *et al.* (2018) dan Mulyani (2018) yang membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penerapan penyajian laporan keuangan yang selalu diperhatikan dapat menciptakan suatu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, riset ini tidak selaras dengan riset yang dilaksanakan oleh Yolanda (2018) yang membuktikan penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Bedasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif tidak signifikan dilihat dari nilai B dengan

arah positif dan signifikan dilihat dari nilai signifikansi diatas 0,05 terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tidak terdapat pengaruh antara aksesibilitas pengelolaan laporan keuangan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah selaras dengan riset yang dilakukan Putri (2018) yang menyatakan bahwa aksesibilitas tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, riset ini tidak selaras dengan riset yang dilakukan Yolanda (2018)) yang menyatakan apabila aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan aktivitas pengendalian berpengaruh positif tidak signifikan dilihat dari nilai B dengan arah positif dan signifikan dilihat dari nilai signifikansi diatas 0,05 terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah artinya apabila aktivitas pengendalian meningkat maka tidak akan mempengaruhi suatu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tidak terdapat pengaruh antara aktivitas pengendalian dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan riset yang teliti oleh Putri (2018) yang menyatakan bahwa aktivitas pengendalian tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, riset ini tidak sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Mulyani (2018) yang membuktikan apabila aktivitas pengendalian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis kelima bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan dilihat dari nilai B dengan arah positif dan signifikan dilihat dari nilai signifikansi dibawah 0,05 terhadap kepercayaan *public-stakeholder*. Adanya korelasi suatu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kepercayaan *public-stakeholder* selaras dengan penelitian Nurriszkiana *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kepercayaan *public-stakeholder*. Semakin akuntabel suatu pengelolaan keuangan daerah, maka meningkatnya kepercayaan *public-stakeholder* terhadap pemerintah daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aktivitas pengendalian tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan *public-stakeholder*.

Dari hasil penelitian ini maka peneliti selanjutnya disarankan untuk: 1) mengganti atau memperluas sampel dan populasi dengan menambahkan sampel untuk *public-stakeholder* eksternal 2) menambahkan atau mengganti variabel lain seperti kinerja pemerintah daerah, gaya kepemimpinan, politik dinasti 3) mengembangkan metode penelitian dengan teknik wawancara dan menggunakan kuesioner terbuka.

REFERENSI

- Fauzani, F. M., Purwati, A. S., & Sudjono. (2018). Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 8(1), 1-15.
- Hehanussa, S. J. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *Conference in Busniess, Accounting and Management*, 2, 82-90.
- Krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi (Keempat)*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mulyani, S. (2018). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Value For Money, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018)*. STIKUBANK SEMARANG.
- Nurritziana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(1), 28-47. <https://doi.org/10.18196/jai.18159>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2005).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010).
- Putri, M. N. F. (2018). Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Wonogiri [IAIN Surakarta]. In *IAIN Surakarta* (Vol. 15, Issue 40). http://awsassets.wfnz.panda.org/downloads/earth_summit_2012_v3.pdf <http://hdl.handle.net/10239/131> https://www.uam.es/grupos/investigacion/publicaciones_jesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion_para_el_aprendizaje_Perspectiva_alumnos.pdf <https://www>
- Rahmawati, N. . (2013). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Stakeholder*. Universitas Gajah Mada.
- Solopos. (2017). *Potret Akuntabilitas Keuangan Daerah di Jawa Tengah*.
- Superdi. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan; Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung). *JOM Fekon*, 4(1).
- Surjono, W., & Firdaus, N. R. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(1), 1357-1368.
- Yolanda, S. (2018). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderating (Studi Emp.
JOM FEB, 1(1), 1-15.